

KONTRIBUSI NILAI MORAL SERAT NITIPRAJA DALAM MENYIAPKAN PEMIMPIN INDONESIA YANG BERKARAKTER

Sumaryati

Pada beberapa tahun terakhir ini, bangsa Indonesia bertubi – tubi terkena musibah. baik musibah alam yang berupa banjir, longsor, gunung meletus, guncangan gempa, maupun musibah yang berupa gempa sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Gempa social, politik, ekononomi, dan hukum yang bertubi – tubi dan silih berganti ini menunjukkan betapa rendahnya kualitas karakter manusia Indonesia umumnya, dan kualitas karakter pemimpin Indonesia khususnya. Sikap tidak tegas, saling hujat, saling tidak percaya, saling menjatuhkan, tidak memberikan keteladanan, dan meniadakan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan, dan mengagug-agungkan materi, merupakan beberapa sifat yang melekat pada pemimpin bangsa ini di beberapa dekade terakhir. Bahkan Indonesia termasuk rangking tertinggi dalam daftar urutan negara terkorop di dunia. Secara mendasar hal tersebut disebabkan oleh adanya krisis multi dimensi dalam diri masyarakat Indonesia, yaitu krisis dalam hal etika, kepercayaan diri, dan kepercayaan social. Bersamaan dengan berbagai krisis tersebut, bangsa dan masyarakat Indonesia harus berhadapan dengan masa globalisasi. Pada masa ini dituntut adanya karakter yang kuat, agar masyarakat dan bangsa ini tidak mudah terpengaruh dan terkena arus. Bagaimana nasib bangsa dan masyarakat ini, jika masyarakatnya terlebih pemimpinnya tidak berkarakter kuat, pastinya akan menjadi bangsa yang semakin tidak nampak eksistensinya di mata bangsa lain.

Agar memiliki kemampuan mental yang kuat, maka karakter bangsa dan pemimpin harus dipersiapkan dan diperkuat. Salah satu cara menempa karakter adalah dengan memberikan wawasan, gambaran, orientasi tentang beberapa karakter pemimpin yang dibutuhkan bangsa ini, Wawasan, orientasi tentang beberapa karakter pemimpin tersebut, dipaparkan dalam salah satu karya sastra Indonesia, yaitu serat Nitipraja, yang diciptakan pada masa kerajaan Mataram masa kepemimpinan Sultan Agung. Terdapat tiga tingkatan penguasa dengan beberapa karakternya. Penguasa nistha memiliki karakter keinginannya sangat tinggi (muluk-muluk) dan sebatas janji – janji pada warganya saja, jika berhasil dianggap sebagai jerih payahnya sendiri, jika memerintah harus segera dilaksanakan, ingin selalu dihargai, memaksakan kehendak, teman sekerja dianggap sebagai perintang prestasinya, menyimpan niat jahat, segala sesuatu diukur secara keduniawian, pola pikir sebagai pedagang. Penguasa madya dengan beberapa karakter menjalankan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku dan secara sungguh-sungguh, menghormati orang lain, mengutamakan kesejahteraan bersama, teman kerja sebagai mitra, memiliki kepercayaan kepada bawahan, dan tidak otoriter. Penguasa tingkatan ketiga adalah penguasa utama dengan karakter mengerti dan memahami makna segala yang ada (bait 15), tidak mudah tergiur harta, melaksanakan tugas dengan ikhlas dan tanggungjawab dengan didasarkan pada peraturan yang berlaku dan aturan agama, antara lahir dan batin seimbang, setia pada Negara dan rela berkorban demi bangsa dan negara (bait 16), memperhatikan banyak pihak (bait 22), melayani semua warga secara sama (bait 31), jiwa pengabdian pada Negara dan bangsa (bait 72). Setelah calon pemimpin Indonesia memiliki wawasan tersebut, kemudian dapat memilih secara tepat dan benar karakter mana yang akan diwujudkan dan dikembangkan, serta termotivasi untuk selalu meningkatkan penguasaan pengetahuan dan pendekatan dengan Tuhan

Kata kunci : serat Nitipraja, penguasa nistha, penguasa madya, penguasa utama

I. PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan makhluknya dalam perbedaan untuk saling mengenal dan menyempurnakan. Perbedaan dengan demikian merupakan suatu hal yang wajar, yang dapat menjadi ciri khas / pembeda antara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian perbedaan tidak seharusnya dihilangkan, tetapi bagaimana perbedaan tersebut untuk dikelola dan dikembangkan. Hal ini juga selalu didukung oleh fakta, jika seseorang itu disamakan dengan orang lain, pasti orang tersebut akan membela dirinya, bahwa dia berbeda dari yang lain. Demikian pula halnya dengan konsep kepemimpinan dalam setiap Negara pasti memiliki khas dan cirinya masing-masing. Konsep kepemimpinan ini pasti akan ditentukan oleh system pemerintahan yang digunakan oleh Negara. Sistem pemerintahan Indonesia adalah system pemerintahan yang demokratis, yang didasarkan pada landasan filosofi Negara, Pancasila. Pemimpin adalah penyelenggara system pemerintahan yang dianut. Dengan demikian pemimpin setiap Negara pasti akan memiliki ciri khas / pembeda, demikian pula dengan kepemimpinan Indonesia. Dengan kata lain kepemimpinan antara Negara yang satu dengan Negara yang lain, dapat dibedakan. Pembeda pemimpin Indonesia dengan pemimpin lainnya adalah Pancasila, artinya pemimpin Indonesia dalam setiap langkah dan perbuatannya harus dilekati nilai-nilai Pancasila.

Apabila diamati dan dianalisis dapat disampaikan bahwa kekhasan para pemimpin Indonesia sekarang ini hampir / tipis tidak terlihat. Kondisi kepemimpinan nasional Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai berikut; adanya degradasi perilaku kepemimpinan nasional (saling fitnah, saling hujat, provokasi, saling jegal, saling adu domba), pemimpin tidak mencegah pengikutnya melakukan pelanggaran, tidak peka terhadap aspirasi rakyat, tidak melakukan pendidikan politik bagi pengikutnya, belum bersikap sebagai negarawan (masih mengutamakan golongan/utusan), mind set yang kolosif, nepotism, koruptif, tidak memberikan keteladanan berperilaku, tidak tegas, dan menjadikan agama sebagai payung bagi kebijakan politiknya. Sifat-sifat ini tentu saja sangat bertentangan dengan karakter pemimpin Indonesia yang sesungguhnya, yaitu kepemimpinan yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal ini antara lain disebabkan oleh minimnya penguasaan konsep kepemimpinan Indonesia (Pancasila), dan kurangnya kepercayaan diri (sehingga suka meniru yang dianggapnya trendi dan modern). Pada

hal pencirian identitas kepemimpinan , baik dari sikap maupun cara berfikir jelas harus nampak, sehingga pemimpin Indonesia nampak di antara pemimpin-pemimpin lainnya. Upaya menumbuhkan kembali jiwa kepemimpinan asli Indonesia, harus segera dilakukan, antara lain yaitu dengan mengkaji nilai-nilai budaya bangsa. Salah satu hasil budaya Indonesia yang sangat luhur dan memiliki kontribusi bagi lahirnya pemimpin Indonesia yang berkarakter Indonesia adalah serat Nitipraja. Corak pemikiran moral penguasa / pemimpin yang ada di serat Nitipraja adalah pemikiran moral yang religious-humanistik. Hal ini selaras dengan konsep kepemimpinan Indonesia yang berdasarkan pada nilai Pancasila. Nilai ketuhanan dan kemanusiaan merupakan basis bagi nilai-nilai dasar Pancasila lainnya. Jadi corak pemikiran moral penguasa / pemimpin yang ada di serat Nitipraja dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan untuk mempersiapkan dan atau memperkuat karakteristik pemimpin Indonesia, di antara pemimpin-pemimpin bangsa lainnya. Agar hal tersebut dapat terealisasi maka kajian terhadap karya-karya sastra kuna, khususnya serat Nitipraja ini sangat perlu dilakukan oleh lembaga pendidikan maupun instansi terkait lainnya.

II. PEMBAHASAN

1. Pengertian Serat Nitipraja

a. *Serat Nitipraja* sebagai salah satu karya dari Sultan Agung

Serat Nitipraja termasuk salah satu teks / naskah Jawa yang berbentuk *tembang / sekar macapat*. Setelah di cek dari beberapa naskah *Nitipraja* yang ditemukan penulis, pada umumnya naskah-naskah tersebut mengandung media *tembang Dhandanggula*. Apabila diperhatikan dengan seksama, tahun yang terdapat didalam sengkalan *Serat Nitipraja*, sengkalan yang berbunyi *geni rasaning driya eka*. Yang berarti tahun 1596 AJ atau tahun 1641 M, maka *serat nitipraja* disusun pada masa pemerintahan Sultan Agung di kerajaan Mataram yang berkuasa pada tahun 1613-1645 M (Magnis Suseno, 1991:33; De Graaf dan Pigeut, 1986:295; Soemarsaid, 1985:50-51). Tidak mengherankan apabila kemudian dinyatakan bahwa *Serat Nitipraja* merupakan karya Sultan Agung.

Umumnya para ahli menyatakan juga bahwa *Serat Nitipraja* karya Sultan Agung, Walaupun secara tidak langsung. Maksudnya pokok-pokok ajaran yang

terkandung di dalam *Serat Nitipraja* adalah hasil cipta pemikiran Sultan Agung, sedangkan terwujudnya sebagai karya tulis (*riptaan*) adalah oleh seorang pujangga pada saat itu. Seorang pujangga biasanya juga seorang abdi dalem.

b. Keberadaan *Serat Nitipraja*

Serat Nitipraja disimpan di beberapa perpustakaan sebagai berikut :

1). Perpustakaan di Yogyakarta

- a) Perpustakaan Sonobudoyo Yogyakarta
- b) Perpustakaan Kraton Kasultanan Yogyakarta
- c) Perpustakaan Kadipaten Pakualaman Yogyakarta

2). Perpustakaan di Surakarta

- a) Perpustakaan Sasana Pustaka Kraton Kasunanan Surakarta
- b) Perpustakaan Reksa Pustaka Kadipaten Mangkunegaran Surakarta
- c) Perpustakaan Radya Pustaka Surakarta

3). Perpustakaan Leiden di Negeri Belanda

c. Nilai – nilai Moralitas penguasa dalam *Serat Nitipraja*

1). Moralitas penguasa yang berdimensi Ketuhanan

Kekuasaan adalah kemampuan memaksakan kebijakan sehingga membuat orang lain melakukan tindakan sesuai dengan yang dikehendaki. Kekuasaan dalam pengertian ini searti dengan kata inggris *power*. Pemaknaan seperti itu, dalam paham orang Jawa tidak sepenuhnya cocok. Bagi manusia Jawa, kekuasaan dipahami sebagai sesuatu yang metafisik dan sekaligus (Hermawan 1996:25). Kekuasaan adalah ungkapan energy ilahi, bukan semata – mata gejala social, tetapi merupakan ungkapan kekuatan kosmis yang memenuhi seluruh alam.

Figur penguasa tertinggi, bahkan figur penguasa dunia tertinggi, dalam orang Jawa adalah sosok raja (Moertono, 1985:32). Raja adalah figur yang mempunyai kemampuan memusatkan seluruh kekuatan kosmis dalam dirinya, sehingga seorang raja mempunyai kasekten melebihi orang kebanyakan (Suseno, 1985:100). Konsep kekuasaan Jawa bersifat teokrasis. Menurut paham Jawa yang mendapat pengaruh Hindu, terdapat konsep Raja-Dewa, seorang raja dianggap sebagai penjelmaan dewa. Kemampuan seorang raja memusatkan kekuatan kosmis dalam dirinya, sehingga mampu mengetahui rahasia kehidupan, menjadikan

pantas dianggap penjelmaan dewa. Menurut pandangan Jawa yang mendapat pengaruh Islam, Raja bukanlah penjelma Dewa tetapi wakil tuhan di dunia. Konsep kekuasaan jawa yang teokratis itu dapat dijumpai dalam berbagai karya, misalnya dalam Babat Tanah Jawi, Centhini, dan Wulangreh.

Raja sebagai penjelmaan dewa, sebagai wakil tuhan di dunia, sebagai penerimamandat illahi mempunyai kekuasaan yang absolut. Segala yang ada adalah milik raja. Raja pemegang kekuasaan Negara secara mutlak. Raja berhak mengatur kehidupan. Raja adalah penegak aturan, hukum dan keadilan sebagaimana dikehendaki tuhan, karenanya, semua kawula (rakyat) wajib taat. Siapa berani menentang raja, berarti berani menentang Tuhan (Moedjanto, 1994:122).

Besarnya kekuasaan seorang penguasa dalam figur seorang raja Jawa terungkap dalam kalimat *ratu gung binathoro, bau dhendha nyokrowati* (raja yang mempunyai kekuasaan sebesar dewa, pemelihara hokum dan penguasa dunia, juga dalam ungkapan *wenang wiseso ing sanagari, sang amurwo bumi*. Hak seorang raja memang sangat besar. Namun, hal itu juga diimbang adanya prasyarat kemestiaan yang berat juga, hak itu terungkap dalam *berbudi bowo leksono ambeg adil paromo arto, sabdo pandhito ratu tan keno wola wali*(seorang raja harus memiliki keputusan yang jelas dan tegas). Apabila seorang raja secara porposional menggunakan hak dan menjalankan kewajiban, maka ia dipandang memiliki “wahyu sejati”. Terhadap raja atau pemimpin yang demikian orang Jawa akan bersikap patuh, segalanya *dherek ngarso dalem* (terserah kehendak raja) (Moedjanto, 1994 :77,145).

Usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan bukan dilakukan dengan cara-cara empiris, tetapi dengan jalan memusatkan daya-daya kosmis ke dalam diri dengan cara *semedi* / bertapa untuk mendapat wahyu illahi. Yang perlu dicatat bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan didalam *semedi* bukan semata-mata ditentukan oleh kemampuan *semedi*, tetapi yang terpenting adalah karena izin dan petunjuk illahi.

Seorang penguasa menurut *serat nitipraja* dalam diri pribadinya harus selalu menjelmakan perintah-perintah tuhan. Apabila hal ini sudah berhasil ditanamkan

dan direalisasikan, maka konsekuensinya segala perintah raja harus dipatuhi oleh warganya, seperti terungkap dalam bait ke-23 dan ke-34 serat Nitipraja. Pada bait ke-23 dikemukakan secara jelas tentang bagaimana seharusnya perilaku seorang penguasa yang merealisasikan perintah raja sebagai wakil tuhan, seluruh perilaku kebijaksanaannya harus diwarnai oleh tuntutan Tuhan, jika tidak demikian, Negara akan kacau. Seorang penguasa juga harus bersikap tegas kepada siapapun, tidak boleh berbelas kasih dalam merealisasikan kebenaran.

Ketaatan dan pelaksanaan perintah Tuhan oleh penguasa diwujudkan dengan menjalankan, mengamalkan, dan mengembangkan perintah Tuhan, dengan berlandaskan pada kesadaran etis dan religious, bukan karena landasan lain yang bersifat duniawi. Hal ini tersurat pada bait ke-69, seperti berikut, ”makanan kaumnya dijaga, menjaga waktu lima kali (sholat lima waktu), tulus hatinya, badannya tinggi besar, juga memberikan zakat sebagai penyuciannya, diserahkan kepada kaum, setia pada Tuhan, juga menjunjung pertapa”.

2). Moralitas penguasa yang berdimensi kemanusiaan

Kekuasaan selalu diperlukan, karena masing-masing atau setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan setiap pribadi tidak dapat dilakukan secara sendirian saja, tetapi selalu melibatkan bahkan membutuhkan hubungan / bantuan orang lain. Jadi kekuasaan itu sangat erat dengan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Agar kekuasaan tetap memiliki arti positif yang lebih banyak lagi bagi kehidupan manusia, maka kekuasaan harus berdimensi kemanusiaan. Agar kekuasaan selalu berdimensi kemanusiaan, maka yang harus senantiasa diperhatikan adalah nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri (khususnya tentang moralitas manusia). Intinya pokok moralitas manusia adalah kesadarannya sebagai makhluk ciptaan tuhan.

Kesadaran penguasa sebagai makhluk ciptaan tuhan, bahkan sebagai penerus dan perantara ajaran-ajaran tuhan, harus direalisasikan dalam kehidupan social bersama kemanusiaan. Seorang penguasa selain dituntut untuk selalu taat dan menjalankan perintah tuhan, atau menjalani hubungan baik dengan tuhan, dalam serat nitipraja ini seorang penguasa juga dituntut untuk menjalani hubungan baik dengan sesamanya. Hal ini termuat pada bait ke-70, seperti berikut, ” dan sediakan juga untuk

fakir miskin, rakyat yang kekurangan, juga anak yatim, yang menginginkan kemuliaan, jika dekat dengan orang yang berbelas kasihan, patuh pada pandita, taat pada ratu, saling berkunjung, dan segala aturan dilaksanakan “. Moral penguasa yang berdimensi kemanusiaan ini merupakan perealisasi lebih lanjut dari moral penguasa yang berdimensi ketuhanan. Atau sebaliknya, moral penguasa yang berdimensi kemanusiaan dikembangkan lebih lanjut menjadi moral penguasa yang berdimensi ketuhanan. *Serat Nitipraja* menggunakan istilah penguasa tingkat Madya (sedang) sebagai pangejawantahan penguasa tingkat utama.

d. Hakikat Moral Penguasa dalam *Serat Nitipraja*

Menurut *Serat Nitipraja*, terdapat tiga tingkatan penguasa, yaitu penguasa nistha (hina), penguasa sedang (madya), dan penguasa utama. Hal ini dimuat pada bait ke-10. Tingkatan pertama yaitu penguasa nistha (hina), memiliki sifat tidak tahu keinginan rakyat. Hal ini ditulis pada bait ke-11 sampai 13, yang menyebutkan beberapa sifat penguasa nistha, yaitu keinginannya sangat tinggi (muluk-muluk) dan sebatas janji – janji pada warganya saja, jika berhasil dianggap sebagai jerih payahnya sendiri, jika memerintah harus segera dilaksanakan, ingin selalu dihargai, memaksakan kehendak, teman sekerja dianggap sebagai perintang prestasinya, menyimpan niat jahat, segala sesuatu diukur secara keduniawian, pola pikir sebagai pedagang.

Penguasa tingkatan kedua adalah penguasa madya, cirri-ciri penguasa tingkat ke dua ini disebutkan pada bait ke-14, yaitu; menjalankan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku dan secara sungguh-sungguh, menghormati orang lain , mengutamakan kesejahteraan bersama, teman kerja sebagai mitra, memiliki kepercayaan kepada bawahan, dan tidak otoriter. Berdasarkan isi bait ke-14 tersebut, dapat dinyatakan bahwa penguasa madya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masih bersifat imperative hipotetis belum imperative kategoris. Maksud kalimat tersebut adalah penguasa madya seluruh perilaku dan kebijakannya masih mengandaikan adanya persyaratan yaitu adanya peraturan, belum muncul karena kesadaran dari penguasa itu sendiri. Dapat dinyatakan penguasa madya belum memiliki pijakan yang kokoh dan kuat, karena pijakannya masih sebatas buatan manusia, yang kadangkala masih sangat relative.

Penguasa tingkat ketiga, yaitu penguasa utama. Ciri-ciri penguasa tersebut dijelaskan pada bait ke-15, 16, 19 – 22, 31, 72, yaitu mengerti dan memahami makna segala yang ada (bait 15), tidak mudah tergiur harta, melaksanakan tugas dengan ikhlas dan tanggungjawab dengan didasarkan pada peraturan yang berlaku dan aturan agama, antara lahir dan batin seimbang, setia pada Negara dan rela berkorban demi bangsa dan negara (bait 16), memperhatikan banyak pihak (bait 22), melayani semua warga secara sama (bait 31), jiwa pengabdian pada Negara dan bangsa (bait 72).

Upaya yang dilakukan agar dapat mendekati penguasa utama adalah penguasa harus memiliki pikiran jernih dan baik dalam apapun yang dilakukan, hal ini tersurat dalam bait ke-35 dan 36 serat Nitipraja. Agar pikiran jernih dan baik, maka harus ada kemampuan menata hati, agar memiliki kemampuan menata hati, penguasa harus tahu yang dikehendaki atau dipilihnya. “Selalu ingat-ingatlah jangan sampai lupa, dengan pikiran jernih dan baik, untuk mencari sesuatu tanda dan mengatur keheningan batin, namun apabila ada ujung ucapan, memukul arah utara kena timur, memukul arah barat dapat kena selatan, lawannya arah, ketahuilah sebentar-bentar harus mengerling mata dan alis, untuk mau ditata” (bait ke-35 serat Nitipraja). Pada bait ke-36, dinyatakan bahwa pengetahuan memiliki fungsi untuk menentukan pilihan atau kehendak secara tepat. Orang yang berpengetahuan biasanya dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk, serta antara yang indah dan yang tidak indah, selanjutnya juga memiliki kemampuan mencari alternative penyelesaian jika terdapat keputusan / tindakan yang tidak / kurang semestinya.

Predikat penguasa utama tidak mudah. Penguasa utama tidak sekedar taat pada peraturan yang ada, namun harus mampu menangkap maknanya, dicamkan dalam hati, dicocokkan dengan pengetahuan atau ilmu yang ada, lalu direalisasikan untuk kesejahteraan bersama. Kemampuan ini dapat dimiliki setelah penguasa mampu mensitesakan kemampuan batin dan pikir. Kemampuan batin dapat dikembangkan dan dipupuk dengan selalu merealisasikan perintah Tuhan, dan kemampuan pikir dapat dikembangkan dan disempurnakan dengan terus menerus menambah ilmu pengetahuan. Secara singkat kriteria penguasa utama menurut serat Nitipraja adalah

mampu memahami dan merealisasikan nilai kemanusiaan dan nilai religious, serta memiliki ilmu yang cukup.

3. Pengertian karakter pemimpin Indonesia

a). Pengertian karakter

Akar kata “karakter” dapat dilacak dari kata lain “*kharakter*” dan “*kharax*”, yang maknanya “*tools for marking*”, alat untuk memberi merek / tanda (Denny Setiawan .2011: 2). Kata ini mulai banyak digunakan kembali dalam bahasa Perancis “*caractere*” pada abad ke-14, dan kemudian masuk dalam bahasa Inggris menjadi “*character*”, dan dalam bahasa Indonesia “karakter”. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia Poerwodarminta, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan lainnya. Karakter merupakan istilah yang menunjuk pada aplikasi nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tindakan / tingkah laku. Karakter yang kuat dibentuk oleh penanaman nilai yang menekankan tentang baik dan buruk. Karakter yang kuat adalah respon yang sudah teruji berkali-kali dan telah berbuah kemenangan. Terdapat lima hal yang mempengaruhi terbentuknya karakter seseorang, yaitu temperamen dasar (hal / sifat yang dominan pada sesatu / seseorang), keyakinan (hal yang dipercaya), pendidikan (apa yang diketahui, wawasan), motivasi hidup (semangat hidup, apa yang dirasakan), dan perjalanan (masa lalu seseorang, apa yang pernah dialami).

Dalam pengertian istilah, karakter dipahami sebagai hal yang terkait dengan mengerti tentang kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan (Kevyn Ryan dan Karen.E.Bohli , 1999 : 5). Mengerti kebaikan tidak hanya dalam arti kognitif, tetapi juga terkait dengan pengertian praktis, yaitu pengertian yang

terkait dengan tindakan. Salah satu tolak ukur menguji karakter adalah dengan tindakan yang dilakukan seseorang dalam situasi kritis.

Tujuan mengembangkan karakter adalah mendorong lahirnya anak-anak yang baik. Begitu tumbuh dalam karakter yang baik, anak-anak akan tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal terbaik dan melakukannya dengan benar, dan cenderung memiliki tujuan hidup. Membangun karakter yang efektif, ditemukan dalam lingkungan sekolah yang memungkinkan semua anak menunjukkan potensi mereka untuk mencapai tujuan yang sangat penting (Baittstich,2008 : 45). Hal ini akan sangat mempengaruhi pola-pola dan mind set mereka dalam memimpin bangsa dan masyarakat Indonesia ke depan.

b.) Nilai moral serat Nitipraja dan karakter pemimpin Indonesia

Nilai moral penguasa dalam serat Nitipraja adalah harus adanya keseimbangan antara kemampuan religiusitas, yaitu kemampuan memahami dan merealisasikan ajaran-ajaran agama (Tuhan), dan kemampuan untuk memanusiakan manusia lain, yaitu menghargai dan menghormati adanya orang lain. Kemampuan tersebut akan berkembang lebih baik dan memiliki dasar yang kokoh, apabila penguasa yang bersangkutan memiliki pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Religiusitas yang tinggi diharapkan dapat sebagai penangkal bagi penguasa untuk tidak mudah tergiur, tergoda oleh hal-hal yang duniawi, apalagi dengan merugikan pihak lain. Hal ini dikarenakan penguasa biasanya berada dalam lingkungan kehidupan dunia yang cukup. Karakter atau ciri-ciri penguasa utama dalam serat Nitipraja adalah mengerti dan memahami makna segala yang ada, tidak mudah tergiur harta, melaksanakan tugas dengan ikhlas dan tanggungjawab dengan didasarkan pada peraturan yang ada dan aturan agama, antara lahir dan batin seimbang , memperhatikan banyak pihak , melayani semua warga secara sama , dan berjiwa pengabdian pada Negara dan bangsa.

Jika ciri-ciri penguasa dalam serat Nitipraja di atas dipersandingkan dengan ciri-ciri pemimpin Indonesia dapat dinyatakan sebagai berikut. Pemimpin Indonesia secara otomatis seluruh aktivitas harus disemangati dan dijiwai nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan social. Dengan demikian karakter, ciri pembeda pemimpin Indonesia dengan pemimpin negara lain adalah adanya sikap yang selalu dijiwai sekaligus cerminan dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, dasar Negara Indonesia, yang intinya adalah perealisasi nilai ketuhanan (adanya kemampuan religius) dan nilai kemanusiaan (kemampuan memanusiaikan manusia lain). Secara detail karakter pemimpin Indonesia adalah religius, humanis, cerdas, negarawan, suka musyawarah, tegas, memiliki kepedulian social yang tinggi. Perwujudan karakter tersebut adalah seimbang proporsional, artinya dominasi salah satu karakter disesuaikan dengan tempat, waktu, dan keadaan. Dengan demikian terdapat suatu kesesuaian antara nilai moral penguasa utama dalam serat Nitipraja dengan karakter pemimpin Indonesia.

Adapun kontribusi nilai moral penguasa serat Nitipraja bagi penyiapan pemimpin Indonesia yang berkarakter adalah memberikan tambahan wawasan tentang berbagai karakter pemimpin, yang selanjutnya dapat memberikan orientasi karakter yang mana yang akan dipilihnya, sekaligus memotivasi pemimpin Indonesia untuk semakin berupaya mewujudkan karakternya. Upaya mewujudkan karakter tersebut dengan meningkatkan kemampuan pemimpin untuk mensitesakan kemampuan batin dan pikir. Kemampuan batin dapat dikembangkan dan dipupuk dengan selalu merealisasikan perintah Tuhan, dan kemampuan pikir dapat dikembangkan dan disempurnakan dengan terus menerus menambah ilmu pengetahuan. Secara singkat agar karakter pemimpin Indonesia semakin nampak jelas, maka pemimpin Indonesia harus berupaya semakin mendekati dengan Tuhan (banyak beramal dan beribadah), dan semakin giat menuntut ilmu pengetahuan dan pengalaman baru.

III. PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas penulis dapat menyatakan bahwa kontribusi nilai moral Serat Nitipraja dalam menyiapkan pemimpin Indonesia yang berkarakter

adalah memberikan wawasan, gambaran , orientasi tentang beberapa karakter pemimpin. Setelah calon pemimpin Indonesia memiliki wawasan tersebut , kemudian dapat memilih secara tepat dan benar karakter mana yang akan diwujudkan dan dikembangkan, serta termotivasi untuk selalu meningkatkan penguasaan pengetahuan dan pendekatan dengan Tuhan.

Memperhatikan relevansi antara nilai moral penguasa dalam serat Nitipraja dengan lahirnya pemimpin Indonesia yang berkarakter, maka diperlukan pengkajian dan pengembangan terhadap serat Nitipraja . Pengkajian dan pengembangan ini dapat melalui mata pelajaran atau mata kuliah yang terkait dengan pengkajian karya sastra, diiringi dengan kreativitas dari pengampu mata pelajaran atau matakuliah tersebut. Selain itu juga dapat dilakukan dengan pengembangan kajian makna karya sastra dalam pelajaran atau mata kuliah sejarah, tentu juga diiringi dengan kreativitas guru atau dosen pengampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1641. *Serat Nitipraja*. Berdasarkan naskah Koleksi Perpustakaan Musium Sonobudaya: Yogyakarta
- Asad Ali, dkk. 2010 . *Nasionalisme dan Pembangnunan Karakter Bangsa*. PSP Press : Yogyakarta
- Amin Abdullah. 2010. *Pendidikan Karakter: Mengasah Kepekaan Hati Nurani* , makalah disampaikan pada sarasehan Nasinal Pendidikan Karakter, oleh Kopertis Wilayah V Yogyakarta,15 April 2010
- Budi Subanar, 2010. *Mendidik: Membentuk Pribadi yang Berkarakter Tantangan Pendidikan di Era Informasi dan Komunikasi*, makalah disampaikan pada sarasehan Nasional Pendidikan Karakter, oleh Kopertis Wilayah V Yogyakarta,15 April 2010
- Behrend,T.T.1990. *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid I Musium Sonobudaya Yogyakarta*.Djambatan : Bandung
- Dojosantosa,1986. *Unsur Religius dalam Sastra Jawa*. Aneka Ilmu : Semarang
- Ifa H.Misbach. 2006. *Peran Permainan Tradisional yang Berrmuatan Edukatif Dalam Menyumbang Pembentukan Karakter dan Identitas Bangsa*. UPI : Bandung

- Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- Nancy, K. Florida, et. al. 1993. *Javanese Literature in Surakarta Manuscripts Vol.1*. Cornell University : Ithaca New York
- Sudewa, A. 1991. *Serat Nitipraja, Tradisi, Resepsi, dan Transformasi*. Duta Wacana University: Yogyakarta
- Thomas Lickona. 1991. *Educating For Character* . Bantam : New York
- Tim Pendidikan Karakter Kepmendiknas RI. 2010. *Grand Design Pendidikan Karakter*, makalah disampaikan pada sarasehan Nasional Pendidikan Karakter, oleh Kopertis Wilayah V Yogyakarta, 15 April 2010